



LAPORAN HASIL VIDEO CONFERENCE ANTARA DINAS PMD DENGAN  
KECAMATAN, PEMERINTAH DESA DAN PENGURUS BUMDESA  
DENGAN TOPIK BAHASAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BUMDESA 2019

Kepada Yth : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Dari : Kabid Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Masyarakat  
Nomor : 412.1/ 48 /DPMD.C/IV/2020  
Tanggal : 30 April 2020  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan hasil pelaksanaan video conference antara Dinas PMD, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pengurus BUMDesa se Kabupaten Kotawaringin Barat Tanggal 27-28 April 2020.

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagaimana amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 Pasal 12 ayat (3) berwenang membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan, membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan dan memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDesa kepada masyarakat desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, sehingga diharapkan kepada BUMDesa yang telah menerima penyertaan modal dari pemerintah desa serta telah mengelola usahanya untuk menyusun laporan pertanggungjawaban BUMDesa yang terdiri dari Laporan Keuangan dan Laporan Perkembangan Usaha BUMDesa yang disampaikan kepada Kepala Desa selaku Komisaris untuk selanjutnya disyahkan dalam Musyawarah Desa.

Berdasarkan data yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat hingga akhir bulan Maret 2020, terdapat 23 BUMDesa yang telah menyusun Laporan Pertanggungjawaban BUMDesa Tahun 2019 serta 11 BUMDesa yang telah melaksanakan Musyawarah Desa Pertanggungjawaban BUMDesa Tahun Buku 2019 dari sebanyak 76 BUMDesa se Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah terbentuk dan 67 BUMDesa yang telah menerima dana penyertaan modal.

### B. Dasar Pelaksanaan

1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 412.1/41/DPMD.C/IV/2020 Tanggal 15 April 2020 Perihal Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban BUMDesa Tahun 2019.
4. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 412.1/47/DPMD.C/IV/2020 Tanggal 24 April 2020 Perihal Video Conference.

### C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilaksanakan Video Conference melalui aplikasi zoom cloud meeting dengan topik bahasan Laporan Pertanggungjawaban BUMDesa Tutup Buku Tahun 2019 adalah :

- Mencari tau kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Pengelola BUMDesa terkait belum disusunnya laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDesa yang terdiri dari laporan perkembangan usaha dan laporan keuangan BUMDesa.
- Memberikan solusi terkait kendala dan permasalahan yang disampaikan oleh pengelola BUMDesa sehingga diharapkan pengelola BUMDesa dapat menyusun laporan pertanggungjawaban dalam waktu sesegera mungkin.
- Mengingat penyertaan modal ke BUMDesa sebagian besar berasal dari penyertaan modal pemerintah desa yang berasal dari Dana Desa dan sebagai bentuk transparansi laporan keuangan yang tertib dan akuntabel, melalui forum ini juga Dinas PMD menyarankan kepada pengelola BUMDesa untuk menyampaikan laporan tersebut kepada komisaris selanjutnya disampaikan di forum musyawarah desa guna transparansi pengelolaan BUMDesa kepada pemerintah Desa selaku pemilik modal dan masyarakat desa pada umumnya.

### D. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Video Conference dengan topik bahasan Laporan Pertanggungjawaban BUMDesa Tutup Buku Tahun 2019 dilaksanakan selama 2 (dua) hari, yakni :

I. Hari Senin, 27 April 2020 kegiatan diikuti oleh :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Camat Arut Selatan, Kasi PMD Kecamatan Kumai dan Camat dan Kasi PMD Kecamatan Kotawaringin Lama.
3. Tenaga Ahli Pemberdayaan Ekonomi Desa P3MD.
4. 21 Kepala Desa atau yang mewakili pada Kecamatan Arut Selatan, Kumai dan Kotawaringin Lama, dan
5. 22 Perwakilan pengurus BUMDesa Kecamatan Arut Selatan, Kumai dan Kotawaringin Lama.

II. Hari Selasa tanggal 28 April 2020 kegiatan diikuti oleh :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Camat Arut Utara, Kasi PMD Kecamatan Pangkalan Banteng dan Kasi PMD Kecamatan Pangkalan Lada.
3. Tenaga Ahli Pemberdayaan Ekonomi Desa P3MD dan PD Arut Utara.
4. 17 Kepala Desa atau yang mewakili pada Kecamatan Arut Utara, Pangkalan Lada dan Pangkalan Banteng, dan
5. 17 Perwakilan pengurus BUMDesa pada Kecamatan Arut Utara, Pangkalan Lada dan Pangkalan Banteng.

Kegiatan dilaksanakan mulai pukul 08.00 s.d. 12.00 WIB.

### II. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

1. Kegiatan Video Conference dengan topik bahasan Laporan Pertanggungjawaban BUMDesa Tutup Buku Tahun 2019 antara Dinas PMD dengan Camat, Kepala Desa dan Pengelola BUMDesa di Kecamatan Arut Selatan, Kumai, dan Kotawaringin Lama, pada hari Senin, 27 April 2020.

Kegiatan dibuka oleh Kabid Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Masyarakat Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat dengan menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakan video conference dilanjutkan arahan dari Tenaga Ahli Pemberdayaan Ekonomi Desa P1MD Bpk. Fachrus Sayyidin terkait kesimpulan Tenaga Pendamping Profesional P1MD, baik Pendamping Lokal Desa, Pendamping Desa dan Tenaga Ahli untuk siap mendampingi proses penyusunan laporan pertanggungjawaban dan persiapan serta pelaksanaan musyawarah desa LPJ BUMDesa.

n. Kecamatan Arut Selatan

Dari 13 Desa yang ada di Kecamatan Arut Selatan, semua desa sudah mendirikan BUMDesa. Namun dari data yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Maret 2020, ada 4 BUMDesa yang telah menyusun LPJ BUMDesa tutup buku tahun 2019 yaitu BUMDesa Kumpai Batu Atas, Kumpai Batu Bawah, Natai Baru dan Medang Sari tetapi belum ada BUMDesa yang melaksanakan Musyawarah Desa Pelaporan Pertanggungjawaban pengelolaan BUMDesa 2019

- Camat Arut Selatan

Camat Arut Selatan menyatakan agar BUMDesa dapat dikelola dengan baik, diharapkan agar pengelola BUMDesa yang terpilih dapat fokus mengelola BUMDesa, penyertaan modal dapat dikelola dengan baik dan laporan BUMDesa yang disampaikan oleh pengelola BUMDesa kepada Kepala Desa selaku komisaris BUMDesa selain ditembuskan ke Dinas PMD Kabupaten agar juga dapat ditembuskan ke Kantor Kecamatan sehingga kecamatan dapat memantau dan mengetahui perkembangan BUMDesa.

- BUMDesa Bina Usaha Desa Natai Raya

Menurut Kepala Desa dan pengelola BUMDesa Natai Raya, pengelola BUMDesa Bina Usaha telah membuat LPJ BUMDesa 2019 namun masih dicatat secara manual, untuk laporan dalam bentuk aplikasi excel akan meminta bantuan kepada Dinas PMD untuk penginputannya. Unit usaha yang masih aktif dijalankan adalah penggemukan sapi, sedangkan simpan pinjam masih menunggu pengembalian piutang dan unit agen Rumah Pangan Kita sudah tidak dilaksanakan.

- BUMDesa Arut Sejahtera Desa Runtu

Menurut Sekretaris Desa Runtu, jumlah penyertaan modal dari pemerintah desa ke BUMDesa total adalah sebesar Rp. 480.000.000,-, namun kepala desa belum pernah bertemu dengan pengelola BUMDesa. Upaya dari pemerintah desa Runtu adalah bersurat kepada pengurus BUMDesa untuk menyelesaikan LPJ BUMDesa sampai dengan tahun 2019 dan memberi tenggat waktu sampai dengan 31 Mei 2020.

- BUMDesa Pendulangan Unggul Jaya Desa Tanjung Putri

Menurut kepala desa dan pengelola BUMDesa Tanjung Putri, dari penyertaan modal Rp. 100.000.000,- BUMDesa telah menjalankan 3 unit usaha yaitu pembuatan dan penjualan kerupuk, penjualan LPG dan simpan pinjam. Unit usaha yang masih berjalan adalah simpan pinjam. Pengelola BUMDesa sudah membuat LPJ secara manual, untuk penyusunan secara kaidah akuntansi akan meminta bantuan kepada Pendamping Lokal Desa.

- BUMDesa Tanjung Rejeki Desa Tanjung Terantang

Menurut pengelola BUMDesa, unit usaha yang pernah dijalankan adalah simpan pinjam. Unit usaha sudah tidak aktif lagi dan dana penyertaan modal dari pemerintah desa ke BUMDesa disimpan di rekening BUMDesa. Saat ini sedang proses pergantian pengurus BUMDesa.

- BUMDesa Rangda Jaya Bersatu Desa Rangda Pemerintah Desa Rangda baru memberikan penyertaan modal kepada BUMDesa pada Januari 2020 sebesar Rp. 85.000.000,-. Unit usaha yang dikelola pengurus BUMDesa adalah unit depo air minum.
- Desa Umpang tidak mengikuti video conference

b. Kecamatan Kumai

Dari 15 Desa yang ada di Kecamatan Kumai, semua desa sudah mendirikan BUMDesa. 8 BUMDesa sudah menyusun LPJ BUMDesa 2019 yaitu BUMDesa Pangkalan Satu, Sungai Kapitan, Keraya, Sabuai Timur, Sabuai dan Teluk Pulau dan 5 BUMDesa yang sudah melaksanakan Musyawarah Desa Pelaporan Pertanggungjawaban pengelolaan BUMDesa 2019 yaitu BUMDesa Pangkalan Satu, Keraya, Sabuai Timur, Sabuai dan Teluk Pulau.

- Kasi PMD Kecamatan Kumai

Menurut Kasi PMD Kecamatan Kumai, kondisi dan permasalahan BUMDesa di Kecamatan Kumai 70-80% kendalanya adalah modal yang hanya disertakan dari pemerintah desa, belum ada modal yang disertakan oleh pihak ketiga. Selain itu pemilihan unit usaha yang mungkin belum tepat sesuai potensi desa dan yang paling mendasar adalah belum adanya pendapatan yang layak bagi pengurus BUMDesa sehingga BUMDesa belum dikelola dengan baik dan maksimal.

- Desa Batu Belaman

Pengurus BUMDesa sudah menyusun laporan secara manual, untuk penyusunan menggunakan aplikasi excel belum dan akan meminta bantuan kepada Dinas PMD.

- Desa Sungai Bedaun

Penyertaan modal pemerintah desa adalah Rp. 100.000.000,-. Pengurus sudah menyelesaikan LPJ 2018 namun untuk LPJ 2019 belum diselesaikan. Laporan masih dibuat secara manual karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman pengurus.

- Desa Kubu

Pengurus BUMDesa Kubu sudah membuat LPJ 2018 namun masih belum menyelesaikan LPJ tahun 2019 karena masih ada kendala pada persediaan barang dagang yang belum clear/sinkron. Pengurus BUMDesa Kubu sudah bisa menggunakan aplikasi excel pembuatan laporan keuangan BUMDesa.

- Desa Teluk Bogam

Unit usaha yang dijalankan oleh BUMDesa Teluk Bogam adalah simpan pinjam. Buku kas umum dan buku pembantu sudah dibuat, namun karena keterbatasan pengetahuan pengurus sehingga penyusunan laporan belum dibuat.

- Desa Sungai Bakau

Pemerintah Desa telah melakukan upaya menyurati pengurus BUMDesa terkait belum diterimanya LPJ BUMDesa 2019. Unit usaha yang pernah dijalankan BUMDesa adalah pembuatan batako untuk kegiatan pembangunan desa dan pengadaan material.

- Desa Sungai Cabang

Penyertaan modal pemerintah desa adalah Rp. 200.000.000,- dengan unit usaha yang dijalankan oleh pengurus BUMDesa adalah jasa angkutan yang hanya aktif beroperasi dari bulan Mei s.d. Desember 2019. Januari – April 2020 kegiatan BUMDesa sudah tidak aktif. Laporan keuangan belum dibuat karena keterbatasan pengetahuan pengurus.

- Desa Bumi Harjo

Salah satu kendala belum dibuatnya LPJ BUMDesa 2019 adalah bendahara BUMDesa yang kurang aktif dan berada di luar kota serta ada buku-buku yang dibawa oleh bendahara, sehingga pengurus yang lain belum bisa menyusun LPJ BUMDesa.

Unit usaha yang dijalankan adalah simpan pinjam.

- Desa Sungai Tendang tidak mengikuti video conference.

c. Kecamatan Kotawaringin Lama

Dari 15 Desa yang ada di Kecamatan Kotawaringin Lama, 13 desa sudah mendirikan BUMDesa dan 2 desa yang belum mendirikan BUMDesa yaitu Desa Babual Baboti dan Kinjil. 2 BUMDesa sudah menyusun LPJ BUMDesa 2019 yaitu BUMDesa Palih Baru dan Ipuh Bangun Jaya dan baru 1 BUMDesa yang sudah melaksanakan Musyawarah Desa Pelaporan Pertanggungjawaban pengelolaan BUMDesa 2019 yaitu BUMDesa Palih Baru.

- Desa Riam Durian

Unit usaha yang dijalankan oleh BUMDesa Riam Durian adalah simpan pinjam dengan modal Rp. 90.000.000,- dan BRILink Rp. 46.500.000,-. Bendahara belum menyusun LPJ BUMDesa karena kurang aktif, pengurus lainnya belum mengetahui cara penyusunan laporan keuangan.

- Desa Dawak

Penyertaan modal 2018 Rp. 120.200.000,- masih dipegang oleh pengurus BUMDesa yang lama dan belum ada laporan pertanggungjawaban. Unit usaha yang dijalankan adalah penjualan pupuk.

Penyertaan modal 2019 Rp. 192.000.000,- unit usaha yang dijalankan adalah replas TBS dan BRILink. Pengurus belum menyusun laporan pertanggungjawaban usaha dan keuangan BUMDesa.

- Desa Tempayang

Jumlah penyertaan modal pada BUMDesa adalah Rp. 306.663.733,- pada akhir tahun 2019. Pengurus baru memulai menjalankan usaha pada Januari 2020 dengan unit LPG dan BRILink. Pengurus belum menyusun laporan keuangan Januari 2020 sampai dengan sekarang dan sudah membuat buku kas manual.

- Desa Sumber Mukti

Penyertaan modal dari pemerintah desa ke BUMDesa adalah Rp. 100.000.000,- pada bulan Mei 2019. Unit usaha yang dijalankan adalah BRILink. Laporan sudah dibuat secara manual dengan laba Rp. 7.000.000,- an. Pengurus belum mengetahui cara penyusunan laporan keuangan sesuai kaidah akuntansi.

- Desa Lalang

Penyertaan modal tahun 2017 Rp. 50.000.000,-, 2018 Rp. 30.000.000,- dan 2019 Rp. 23.700.000,- dan jumlahnya adalah Rp. 103.700.000,-. Unit usaha yang dijalankan adalah jangkos dan simpan pinjam. LPJ sampai tahun 2018 sudah dibuat dengan dibantu penyusunannya oleh Dinas PMD. BUMDesa ada membeli aset berupa pick up second dan sekarang dalam kondisi rusak.

Kendala BUMDesa belum menyusun LPJ BUMDesa 2019 adalah bendahara mengundurkan diri dan sampai saat ini belum ada pengganti, pengurus yang lain belum mengetahui penyusunan laporan keuangan.

- Desa Kondang  
 Penyertaan modal 2017 Rp. 131.500.000,- dan dibelikan truck second.  
 Penyertaan modal 2018 Rp. 24.000.000,- untuk operasional truck.  
 Penyertaan modal 2019 Rp. 26.000.000,-.  
 Jumlah penyertaan modal Rp. 181.500.000,-.  
 Truck mengalami kerusakan sehingga dijual dengan harga Rp. 130.000.000,- kemudian pengurus BUMDesa membeli lahan plasma seluas 4 Ha Rp. 170.000.000,- dan lahan tersebut belum menghasilkan sehingga belum mendapatkan penghasilan.
  - Desa Sagu Suka Mulya  
 Jumlah penyertaan modal Rp. 500.000.000,- dengan unit usaha yang dijalankan oleh pengurus adalah replas TBS. Karena keterbatasan pengetahuan pengurus, pengurus tidak membuat buku kas umum maupun buku pembantu lainnya tetapi nota-nota, bukti replas dan rekening koran diarsipkan dengan baik oleh pengurus. Pengurus belum menyusun laporan keuangan BUMDesa karena keterbatasan pengetahuan pengurus.
  - Desa Suka Makmur  
 Jumlah penyertaan modal oleh pemerintah desa ke BUMDesa yang diserahkan pada Desember 2019 adalah Rp. 250.000.000,-. Pengurus BUMDesa baru menjalankan usahanya dengan unit usaha BRILink pada Januari 2020. Rencana pengembangan usaha adalah pembelian SPK / replas TBS. Pengurus belum menyusun laporan keuangan BUMDesa.
  - BUMDesa Bersama Waringin Sejahtera  
 BUMDesa Bersama Waringin Sejahtera menjalankan unit simpan pinjam.  
 BUMDesa Bersama waringin Sejahtera berencana mengembangkan usaha unit pertashop bekerjasama dengan PT. Pertamina.  
 Dalam kesempatan ini, disampaikan kepada BUMDesa-BUMDesa se Kecamatan Kotawaringin Lama terkait wacana tersebut BUMDesMa akan melaksanakan Musyawarah Antar Desa untuk menyampaikan program kerja serta musyawarah terkait modal kerja yang diperlukan. Untuk lokasi pertashop, pengurus BUMDesMa sudah memiliki alternatif.
  - Desa Rungun mengikuti video conference, namun mungkin terkendala signal sehingga tidak mengikuti sampai kegiatan selesai.
- d. Ringkasan umum tanggapan Dinas PMD kepada peserta video conference Laporan Pertanggungjawaban BUMDesa tutup buku 2019 dengan peserta Kecamatan Arut Selatan, Kumai dan Kotawaringin Lama yaitu :
1. BUMDesa yang baru menerima penyertaan modal pada Desember 2019 dan mulai menjalankan usahanya pada awal tahun 2020 belum mempunyai kewajiban membuat laporan pertanggungjawaban tutup buku tahun 2019 akan tetapi tetap wajib menyusun laporan keuangan BUMDesa 2020 setiap bulannya.
  2. Untuk pembelian aset BUMDesa misalnya pick up, truck dan aset lainnya agar membeli barang dalam kondisi baru. Karena barang second kurang dapat ditentukan nilai realnya dan umumnya akan dibutuhkan biaya perawatan yang besar.

3. Terkait adanya pengurus BUMDesa yang mengundurkan diri, agar Kepala Desa melakukan seleksi terbatas untuk dilaksanakan pergantian antar waktu. Agar pengurus BUMDesa bisa mendapatkan penghasilan yang memadai, agar pengurus BUMDesa juga dilibatkan dalam kegiatan yang ada di desa.
  4. Pengurus BUMDesa yang telah menyusun laporan secara manual agar menyampaikan tembusan kepada Dinas PMD dan Kecamatan untuk dilakukan evaluasi dan koreksi. Musyawarah Desa LPJ BUMDesa agar tetap diagendakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan terkait pencegahan covid-19.
  5. BUMDesa yang akan menjalankan unit usaha baru agar ada pemisahan modal masing-masing unit usaha untuk mengetahui perkembangan unit masing-masing.
  6. Dinas PMD, Kecamatan dan Tenaga Pendamping Profesional P3MD siap memfasilitasi penyusunan LPJ BUMDesa 2019.
2. Kegiatan Video Conference dengan topik bahasan Laporan Pertanggungjawaban BUMDesa Tutup Buku Tahun 2019 antara Dinas PMD dengan Camat, Kepala Desa dan Pengelola BUMDesa di Kecamatan Pangkalan Lada, Pangkalan Banteng dan Arut Utara pada hari Selasa, 28 April 2020.
- Kegiatan dibuka oleh Kabid Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Masyarakat Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat dengan menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakan video conference dilanjutkan arahan dari Tenaga Ahli Pemberdayaan Ekonomi Desa P3MD Bpk. Fachrus Sayyidin terkait kesiapan Tenaga Pendamping Profesional P3MD, baik Pendamping Lokal Desa, Pendamping Desa dan Tenaga Ahli untuk siap membantu proses penyusunan laporan pertanggungjawaban dan persiapan serta pelaksanaan musyawarah desa LPJ BUMDesa.
- a. Kecamatan Arut Utara
 

Dari 10 Desa yang ada di Kecamatan Arut Utara, 7 desa sudah mendirikan BUMDesa dan 3 desa yang belum mendirikan BUMDesa yaitu Desa Sukarami, Pandau dan Sungai Dau. 1 BUMDesa sudah menyusun LPJ BUMDesa 2019 dan melaksanakan Musyawarah Desa Pelaporan Pertanggungjawaban pengelolaan BUMDesa 2019 yaitu BUMDesa Gandis.

    - Camat Arut Utara
 

Camat Arut Utara menyatakan kendala-kendala dalam pengelolaan BUMDesa di Kecamatan Arut Utara adalah unit usaha yang dikelola masih belum tepat dan belum sesuai potensi desa, pengurus BUMDesa cenderung berusaha di bidang perkebunan yang memerlukan modal yang cukup besar, selain itu SDM pengelola BUMDesa yang masih terbatas dan skop bidang usaha yang terdapat pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masih umum atau cakupannya terlalu luas.
    - Desa Penyombaan
 

Unit usaha yang dikelola pengurus BUMDesa adalah replas TBS, penjualan pupuk, dan gas LPG 3 kg. Pengurus tidak mengalami kendala dalam menjalankan usaha-usaha BUMDesa tetapi karena keterbatasannya sehingga pengurus kesulitan dalam penyusunan administrasi dan pelaporan keuangan BUMDesa. Pengurus sudah pernah mengikuti pelatihan yang dilaksanakan Dinas PMD Tahun 2019 namun kesulitan dalam mengaplikasikan dalam penatausahaan keuangan BUMDesa.

- Desa Panahan  
Penyertaan modal 2018 Rp. 30.500.000,- dan penyertaan modal 2019 Rp. 40.500.000,-. Unit usaha yang dijalankan adalah pengelolaan air bersih desa dengan keuntungan 2018 Rp. 14.900.000,- dan keuntungan pada 2019 Rp. 15.800.000,-. Pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual yaitu buku kas. Belum menyusun laporan keuangan sesuai kaidah akuntansi (Laporan Laba/Rugi, Laporan Perubahan Modal dan Laporan Neraca. Pengurus sudah pernah mengikuti pelatihan yang dilaksanakan Dinas PMD Tahun 2019 namun kesulitan dalam mengaplikasikan karena tidak langsung dipraktekkan dalam penatausahaan keuangan BUMDesa.
- Desa Kerabu  
Kepala Desa merupakan kepala desa baru terpilih dan sampai saat ini belum menerima laporan tentang pengelolaan BUMDesa. Pemerintah desa sudah meminta LPJ BUMDesa kepada pengurus BUMDesa namun belum ada realisasi dan dimungkinkan BUMDesa tidak aktif.
- Desa Nanga Mua  
Penyertaan modal ke BUMDesa adalah Rp. 78.261.000,- pada Desember 2019 dan pengurus baru memulai usaha pada Januari 2020 dengan unit usaha yang dijalankan adalah penjualan solar untuk mensuplai PLTD Desa dan LPG 3 kg. Pengurus belum memahami penjurnalan transaksi terutama terkait transaksi non tunai (utang piutang). Pengurus sudah pernah mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas PMD namun masih kesulitan dalam memposting buku kas dan buku pembantu ke jurnal sehingga belum membuat laporan keuangan Januari 2020 s.d. saat ini.
- Pendamping Desa Arut Utara  
Pendamping desa sudah pernah membantu penyusunan laporan keuangan BUMDesa Penyombaan, Gandis dan Nanga Mua tetapi untuk desa lainnya belum karena belum pernah bertemu dengan pengurus.

b. Kecamatan Pangkalan Banteng

Dari 17 Desa yang ada di Kecamatan Pangkalan Banteng semuanya sudah mendirikan BUMDesa. 5 BUMDesa sudah menyusun LPJ BUMDesa 2019 yaitu BUMDesa Sidomulyo, Arga Mulya, Marga Mulya, Berambai Makmur dan Sungai Pakit. 3 BUMDesa yang sudah melaksanakan Musyawarah Desa Pelaporan Pertanggungjawaban pengelolaan BUMDesa 2019 yaitu BUMDesa Sidomulyo, Arga Mulya dan Sungai Pakit.

- Kasi PMD Kecamatan Pangkalan Banteng  
Kendala-kendala yang dihadapi BUMDesa-BUMDesa di Kecamatan Pangkalan Banteng antara lain :
  1. Pergantian pengurus, yaitu pengurus lama mengundurkan diri namun belum menyelesaikan pertanggungjawaban keuangan sedangkan pengurus baru belum memahami tentang pembukuan keuangan.
  2. Pengurus BUMDesa belum memahami cara mengelola, memilih dan memulai usaha BUMDesa sehingga dana penyertaan modal hanya mengendap di rekening.
  3. Pengurus BUMDesa ada yang belum memahami pembukuan keuangan BUMDesa dan pihak kecamatan juga belum memahami tentang pembukuan keuangan sehingga dari pihak kecamatan belum dapat membantu kendala yang dihadapi BUMDesa.

- Desa Amin Jaya  
Ada beberapa unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa antara lain pembuatan dan penjualan paving block dan konveksi, namun ada kendala dalam beberapa unit karena belum berkembang sesuai harapan. Pengurus BUMDesa sudah menyusun LPJ BUMDesa 2019 dan sudah dilaporkan kepada kepala desa namun memang belum memberikan tembusan laporan kepada Dinas PMD. Pengurus akan mengirimkan tembusan LPJ BUMDesa 2019 ke Dinas PMD dalam waktu segera.
- Desa Karang Sari  
Kepengurusan BUMDesa baru dibentuk pada tahun 2019 dan pengurus belum pernah mendapatkan pelatihan terkait pengelolaan BUMDesa.  
Penyertaan modal tahun 2019 Rp. 45.000.000,- dan tahun 2020 Rp. 81.000.000,-.
- Desa Mulya Jadi  
Penyertaan modal dari pemerintah desa ke BUMDesa pada Desember 2019 Rp. 300.000.000,-. Kepengurusan baru dibentuk pada Januari 2020 dan unit usaha yang dijalankan adalah ayam petelur. Saat ini telah dibangun 2 buah kandang ayam dan baru selesai pembuatan, menyusul pembelian ayam petelur sehingga sampai saat ini belum ada pemasukan/penghasilan dari BUMDesa. Pengurus juga belum melaporkan posisi keuangan Januari s.d. Maret 2020 kepada kepala desa.
- Desa Natai Kerbau  
Penyertaan modal tahun 2015 Rp. 100.000.000,- dan tahun 2017 Rp. 80.000.000,- dan dana penyertaan modal masih ada di rekening BUMDesa karena pengurus sudah tidak aktif.
- Desa Sungai Kuning  
BUMDesa Sungai Kuning tidak aktif terkait kerugian yang dialami oleh unit BRILink, ada sejumlah dana penyertaan modal BUMDesa yang dipinjam oleh pengurus BUMDesa dan kandang sapi yang dibangun belum 100%. Dari mediasi yang pernah dilakukan oleh Dinas PMD dinyatakan belum ada perkembangan. Pemerintah desa masih mengharapkan komitmen dari pengelola BUMDesa.
- Desa Sungai Bengkuang  
Kendala yang dihadapi pengurus BUMDesa sehingga belum menyelesaikan LPJ BUMDesa 2019 adalah hanya sekretaris BUMDesa yang masih aktif, sedangkan direktur dan bendahara tidak aktif dan belum melaksanakan pergantian pengurus terkait belum mampu memberikan gaji yang layak kepada pengurus.  
Penyertaan modal Rp. 168.701.205,- dengan usaha yang dijalankan adalah penyediaan barang dan jasa untuk kegiatan pembangunan pemerintahan desa.
- Desa Simpang Berambai  
Penyertaan modal ke BUMDesa sekitar Rp. 300.000.000an dan pengurus BUMDesa belum pernah memberikan laporan usaha BUMDesa sejak tahun 2017. Pemerintah desa memberikan waktu sampai 31 Mei 2020 untuk penyelesaian laporan dan berencana akan membentuk kepengurusan baru.
- Desa Sungai Pulau mengikuti video conference tetapi tidak sampai selesai.
- Desa Kebun Agung, Sungai Hijau, Pangkalan Banteng dan Karang Mulya tidak mengikuti video conference.

c. Kecamatan Pangkalan Lada

Dari 11 Desa yang ada di Kecamatan Pangkalan Lada semuanya sudah mendirikan BUMDesa. 5 BUMDesa sudah menyusun LPJ BUMDesa 2019 yaitu BUMDesa Pangkalan Tiga, Pandu Senjaya, Lada Mandala Jaya, Sumber Agung dan Purbasari. 1 BUMDesa yang sudah melaksanakan Musyawarah Desa Pelaporan Pertanggungjawaban pengelolaan BUMDesa 2019 yaitu BUMDesa Purbasari.

- Kasi PMD Kecamatan Pangkalan Lada

Kendala-kendala yang dihadapi BUMDesa-BUMDesa di Kecamatan Pangkalan Banteng antara lain :

1. Pengelola BUMDesa memilih menjalankan lebih dari 1 unit usaha. Akan tetapi pada saat salah satu atau lebih unit usaha merugi sehingga pengurus mengundurkan diri.
2. Pihak kecamatan Pangkalan Lada memberikan syarat pada saat pengesahan APBDesa (rekom penambahan penyertaan modal) untuk melampirkan salinan AD/ART BUMDesa, perdes-perdes terkait BUMDesa dan laporan keuangan BUMDesa.
3. Agar pelaporan keuangan BUMDesa diberikan format yang sama untuk setiap BUMDesa.
4. Mengusulkan agar kecamatan juga dilibatkan atau diikutsertakan dalam pelatihan BUMDesa sehingga kecamatan juga memiliki pengetahuan terkait teknis BUMDesa.

- Desa Kadipi Atas

Penyertaan modal yang diterima oleh BUMDesa sebesar Rp. 180.000.000,- dengan menjalankan unit usaha pembuatan batako, TBS dan gas LPG. Unit batako mengalami kerugian karena kualitas batako yang dibuat kurang baik sehingga sebagian rusak dan tidak terjual. Unit TBS yakni BUMDesa menanamkan modal kepada pihak ketiga dengan menerima fee setiap 3 bulan sekali. Unit LPG baru dijalankan pada tahun 2020. Laporan unit TBS telah dibuat dan akan segera dikirimkan softcopy ke Dinas PMD.

- Desa Pangkalan Tiga

Penyertaan modal pemerintah desa ke BUMDesa Rp. 905.000.000,- dan mendapat penyertaan modal dari pihak ketiga yaitu Petani Sawit Mandiri sebesar Rp. 500.000.000,-. Kegiatan usaha yang dijalankan adalah ternak ayam petelur dan penjualan hasilnya serta pembangunan homestay 8 pintu untuk disewakan. Laporan keuangan tahun 2019 sudah disusun oleh pengurus BUMDesa namun belum mendapatkan pengesahan dari Badan Pengawas BUMDesa. Tahun 2020 pemerintah desa Pangkalan Tiga menganggarkan penambahan modal Rp. 100.000.000,- namun belum terealisasi.

- Desa Pangkalan Dewa

Penyertaan modal tahun 2018 Rp. 170.000.000,- dan penyertaan modal 2019 Rp. 360.000.000,-. Unit usaha yang dijalankan pengurus adalah bekerjasama dengan kelompok tani untuk usaha penggemukan sapi (pada awalnya 4 ekor hingga kini berkembang menjadi 5 ekor), unit usaha simpan pinjam dan pembangunan pasar desa untuk disewakan.

Pengurus BUMDesa telah mengundurkan diri, laporan keuangan dibuat manual dan dari laporan yang disampaikan bahwa perkembangan modal yang semula Rp. 530.000.000,- menjadi Rp. 547.800.000,-.

- Desa Sungai Rangit Jaya  
Unit usaha yang dijalankan oleh pengurus BUMDesa adalah unit RSPO yaitu menyediakan pupuk untuk petani sawit dan penjualan TBS ke pabrik, jasa agen BNI 46 yaitu penjualan pulsa, token listrik, jasa pembayaran PBB dan lain-lain dengan modal yang dikembangkan Rp. 40.000.000,-, dan penjualan gas LPG 5 kg dan 12 kg dengan modal yang dikembangkan Rp. 17.000.000,-.  
Kendala yang dialami adalah bendahara tidak aktif sehingga untuk pelaporan tepat waktu belum dapat dilaksanakan. LPJ 2019 sudah dibuat oleh direktur BUMDesa dan sudah diserahkan kepada Kepala Desa dan segera ditembuskan ke Dinas PMD.
  - Desa Pangkalan Durin  
Terkait permasalahan penyertaan modal yang dipinjam oleh pengurus dan perangkat desa, untuk perkembangan pengembalian piutang sudah diterima namun masih sebagian kecil yaitu Rp. 35.000.000,-. Pengurus lama sudah mengundurkan diri dan pemerintah desa sudah meng-SK kan pengurus baru namun hingga saat ini pengurus baru belum mulai menjalankan usaha dengan alasan keterbatasan modal. Dalam waktu dekat rencana usaha yang akan dilaksanakan adalah penjualan LPG.
  - Desa Sungai Melawen dan Makarti Jaya tidak mengikuti video conference.
- d. Ringkasan umum tanggapan Dinas PMD kepada peserta video conference Laporan Pertanggungjawaban BUMDesa tutup buku 2019 dengan peserta Kecamatan Pangkalan Lada, Pangkalan Banteng dan Arut Utara yaitu :
1. Ada beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah menjalin kemitraan dengan BUMDesa diantaranya BRI, BNI, Bank Mandiri, PT. Pos Indonesia, Perum BULOG dan yang terbaru adalah PT. Pertamina melalui program Pertashop. Disarankan BUMDesa untuk memanfaatkan kemitraan ini sebagai unit usaha BUMDesa.
  2. Dinas PMD mengapresiasi apa yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pangkalan Lada terkait syarat pengesahan APBDesa (rekom penambahan penyertaan modal) untuk melampirkan salinan AD/ART BUMDesa, perdes-perdes terkait BUMDesa dan laporan keuangan BUMDesa, semoga langkah ini dapat diikuti oleh Kecamatan lain.
  3. Pada dasarnya pengurus BUMDesa telah menjalankan usaha BUMDesa dengan baik walaupun masih ditemukan di beberapa BUMDesa ada dana penyertaan modal yang masih mengendap di rekening BUMDesa dan diharapkan untuk segera diupayakan penggunaannya dengan prinsip memilih unit usaha yang potensial dengan resiko seminimal mungkin.
  4. Mayoritas pengurus BUMDesa terkendala dalam penyusunan laporan keuangan, baik pengurus yang pernah mendapatkan pelatihan BUMDesa terlebih lagi pengurus baru. Umumnya kendalanya adalah dalam memposting transaksi harian kedalam jurnal, sedangkan untuk pencatatan transaksi pada buku kas harian dan buku pembantu lainnya pada umumnya sudah dilaksanakan dengan baik.
  5. Pengelola BUMDesa yang mendapat kendala dalam penyusunan LPJ BUMDesa agar berkoordinasi dan konsultasi kepada Tenaga Pendamping Profesional Desa, Kecamatan maupun Dinas PMD.
  6. Bagi BUMDesa yang telah membuat LPJ BUMDesa 2019, terkait protokol kesehatan pencegahan Covid-19 agar tetap melaksanakan musyawarah desa terbatas.

### iii. Kesimpulan dan Saran

#### a. Kesimpulan

1. Dari 45 BUMDesa yang diundang mengikuti video conference, terdapat 37 BUMDesa yang mengikuti, 8 BUMDesa yang tidak mengikuti, dan terdapat 2 tambahan diluar undangan yang mengikuti vidcon yaitu BUMDesa Bersama Waringin Sejahtera Kecamatan Kotawaringin Lama dan BUMDesa Karya Makmur Desa Pangkalan Tiga.
2. Terdapat 2 BUMDesa yang telah menyusun LPJ BUMDesa tetapi belum menyampaikan tembusan ke Dinas PMD yaitu BUMDesa Amin Jaya dan Sungai Rangit Jaya.
3. Terdapat 7 BUMDesa yang telah menyusun laporan keuangan BUMDesa secara manual tetapi belum menyampaikan tembusan laporan kepada Dinas PMD yaitu BUMDesa Natai Raya, Tanjung Putri, Batu Belaman, Sumber Mukti, Panahan, Kadipi Atas dan Pangkalan Dewa.
4. Terdapat 21 BUMDesa yang belum menyusun Laporan Keuangan yaitu BUMDesa Runtu, Sungai Bedaun, Kubu, Teluk Bogam, Sungai Bakau, Sungai Cabang, Bumi Harjo, Riam Durian, Dawak, Lalang, Kondang, Sagu Suka Mulya, Rungun, Penyombaan, Kerabu, Karang Sari, Natai Kerbau, Sungai Bengkuang, Sungai Kuning, Simpang Berambai dan Pangkalan Durin.
5. Terdapat 5 BUMDesa yang baru menerima penyertaan modal pada Desember 2019 dan baru menjalankan unit usaha di tahun 2020 sehingga belum berkewajiban menyusun LPJ BUMDesa 2019 yaitu BUMDesa Rangda, Tempayang, Suka Makmur, Nanga Mua, dan Mulya Jadi.
6. Mayoritas pengurus BUMDesa terkendala dalam penyusunan laporan keuangan, baik pengurus yang pernah mendapatkan pelatihan BUMDesa terlebih lagi pengurus baru. Kendala pada umumnya adalah dalam memposting transaksi harian kedalam jurnal yang hasilnya digunakan untuk menghitung laporan laba/rugi, laporan perubahan modal dan neraca keuangan, sedangkan untuk pencatatan transaksi pada buku kas harian dan buku pembantu lainnya pada umumnya sudah dilaksanakan dengan baik.
7. Pengurus BUMDesa menggunakan dana penyertaan modal untuk membeli aset dalam jumlah yang cukup besar, misalnya pembuatan kandang sapi, pembelian unit angkutan dan ada beberapa dalam kondisi second, sehingga pemanfaatan pengembangan modal menjadi kurang maksimal.
8. Pada dasarnya pengurus BUMDesa telah menjalankan usaha BUMDesa dengan baik walaupun masih ditemukan di beberapa BUMDesa ada dana penyertaan modal yang masih mengendap di rekening BUMDesa dan diharapkan untuk segera diupayakan penggunaannya dengan prinsip memilih unit usaha yang potensial dengan resiko seminimal mungkin. Sudah ada beberapa BUMN yang telah menjalin kemitraan dengan BUMDesa diantaranya BRI, BNI, Bank Mandiri, PT. Pos Indonesia, Perum BULOG dan yang terbaru adalah PT. Pertamina melalui program Pertashop. Disarankan BUMDesa untuk memanfaatkan kemitraan ini sebagai unit usaha BUMDesa.
9. Komisaris BUMDesa belum secara aktif menanyakan/meminta laporan perkembangan usaha BUMDesa dan fungsi pengawas juga belum dilaksanakan sehingga banyak pengurus BUMDesa yang belum melaporkan hasil kegiatan usaha kepada Kepala Desa selaku komisaris BUMDesa secara berkala.
10. Dinas PMD dan Tenaga Pendamping Profesional Desa P3MD siap memfasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban BUMDesa.

b. Saran

1. Terkait adanya pengurus BUMDesa yang mengundurkan diri, agar Kepala Desa melakukan seleksi terbatas untuk dilaksanakan pergantian antar waktu. Agar pengurus BUMDesa bisa mendapatkan penghasilan yang memadai, agar pengurus BUMDesa juga dilibatkan dalam kegiatan yang ada di desa.
2. Untuk pembelian aset BUMDesa misalnya pick up, truck dan aset lainnya agar membeli barang dalam kondisi baru. Karena barang second kurang dapat ditentukan nilai realnya dan umumnya akan dibutuhkan biaya perawatan yang besar.
3. Pemerintah desa agar mensupport dan mendorong pengurus BUMDesa untuk penyusunan laporan keuangan, misalnya dengan mengarahkan untuk konsultasi dan koordinasi dengan Pendamping Lokal Desa, Pendamping Desa maupun Kecamatan dan Dinas PMD Kabupaten.
4. Untuk unit usaha yang akan dilaksanakan atau peralihan dari pengurus lama ke pengurus baru, agar pengurus BUMDesa menyampaikan rencana usaha yang akan dilaksanakan kepada komisaris BUMDesa. Setelah Rencana Usaha mendapat rekomendasi pengurus dapat menggunakan dana penyertaan modal. Rencana usaha ini agar dijadikan target usaha yang kemudian akan dievaluasi oleh komisaris dan BPD terkait capaian pelaksanaannya. Sebelumnya, agar pengurus lama sudah memberikan laporan pertanggungjawabannya atas pengelolaan BUMDesa.
5. Pengurus BUMDesa yang telah menyusun laporan secara manual agar menyampaikan tembusan kepada Dinas PMD dan Kecamatan untuk dilakukan evaluasi dan koreksi. Musyawarah Desa LPJ BUMDesa agar tetap diagendakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan terkait pencegahan covid-19.

IV. Penutup

Demikian laporan hasil pelaksanaan video conference dengan topik bahasan laporan pertanggungjawaban BUMDesa tutup buku 2019 dibuat untuk diketahui dan sebagai bahan evaluasi dan kebijakan lebih lanjut.

Kabid Pemberdayaan Usaha Ekonomi  
dan Masyarakat



ROOMHENDI MUSTOFA, S.IP  
Pembina  
NIP. 19701127 199903 1 004